



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

**KUALA PEMBUANG
2025**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/474/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN;
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : PENUTUP.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Juli 2025



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025
TANGGAL 9 Juli 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2./474/2024 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

DARTAR PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH

NO	
1	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,



Ahmad Selanorwanda

AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan hidayahnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini disusun berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 guna memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD.

Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Kami menyadari penyusunan P-Renja ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaannya.

Kuala Pembuang, 12 Agustus 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan



[Signature]
SUKARDI, SE

NIP. 19710603 200501 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN BERJALAN	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KABUPATEN SERUYAN	14
3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupate Seruyan Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.....	14
3.2 Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur	20
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota BADAN PENDAPATAN DAERAH	6
Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024	9
Tabel 2. 3 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	10
Tabel 2. 4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Tahun 2024	10
Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	11
Tabel 2. 6 Nilai IKM BAPENDA Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	12
Tabel 3. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	15
Tabel 3. 2 Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur Tahun 2025	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan (1 tahun). Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Perangkat Daerah rencana 5 (lima) tahunan disebut Renstra Perangkat Daerah dan rencana tahunan disebut Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja BAPENDA) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA, disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan Evaluasi Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Sebagai Dokumen Perangkat Daerah, Perubahan Renja (P-Renja) ini mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD), sebagai implementasi pelaksanaann strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Bapenda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 223 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemenerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arahan dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perubahan (RKA-P) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dalam menilai pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya, untuk mengukur kinerja masing – masing bidang atau sub bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang telah dilaksanakan maupun yang akan datang;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan Bapenda.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH, memuat hasil evaluasi terhadap hasil Renja BAPENDA sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA, memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta dana indikator yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut.
- BAB IV. PENUTUP, memuat uraian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN BERJALAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan, pencapaian-pencapaian target kinerja sebagai mana tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap hasil Renja Bapenda sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dearah Tahun 2025		Reralisasi Kenerja pada triwulan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Unit Kerja Pemerintah Daerah		46,437,393,000		11,520,706,628		14,982,029,853		1,193,124,387	BAPENDA
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		208,245,000		-		53,063,000		-	BAPENDA
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24 Dok	61,404,000	8 Dok	-	8 Dok	4,616,000	0	-	BAPENDA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6 Dok	23,442,000	2 Dok	-	2 Dok	7,814,000	0	-	BAPENDA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6 Dok	23,442,000	2 Dok	-	2 Dok	7,814,000	0	-	BAPENDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	6 Dok	24,525,000	2 Dok	-	2 Dok	8,175,000	0	-	BAPENDA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3 Dok	18,315,000	1 Dok	-	1 Dok	6,105,000	0	-	BAPENDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian	9 Dok	23,967,000	3 Dok	-	3 Dok	7,989,000	0	-	BAPENDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	33,150,000	0 Dok	-	3 Dok	10,550,000	0	-	BAPENDA
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)		24,072,689,349		5,337,153,897		8,315,176,165		991,951,333	BAPENDA
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	126 gaji dan tunjangan	23,978,222,349	26 gaji dan tunjangan	5,334,403,897	50 gaji dan tunjangan	8,288,699,565	40 org	991,951,333	BAPENDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP/SPM yang diterbitkan	3 Dok	20,961,000	1 Dok	-	1 Dok	3,067,000	0	-	BAPENDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3 Dok	14,910,000	1 Dok	-	1 Dok	4,961,600	0	-	BAPENDA
			Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan	6 Dok	24,000,000	2 Dok	2,750,000	2 Dok	7,170,000	0	-	BAPENDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri Wulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semesteran	26 Dok	16,410,000	9 Dok	-	9 Dok	5,392,000	0	-	BAPENDA
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	21 Dok	18,186,000	1 Dok	-	10 Dok	5,886,000	0	-	BAPENDA
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat	Presentase Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		59,934,000		840,000		19,925,500		-	BAPENDA
			Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersusunya Rencana Kebutuhan barang Perangkat Daerah	3 Dok	15,000,000	1 Dok	-	1 Dok	5,000,000	0	-	BAPENDA
			Pengamanan Barang Milik Daerah	kodefikasi dan Inventaris barang	9 jenis	14,940,000	3 jenis	-	3 jenis	4,927,500	0	-	BAPENDA
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	dokumen administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah	3 Laporan	14,994,000	1 Laporan	-	1 Laporan	4,998,000	0	-	BAPENDA
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan Rekonsiliasi barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dok	15,000,000	1 Dok	840,000	1 Dok	5,000,000	0	-	BAPENDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana		1,933,742,000		255,907,030		233,378,700	0	-	BAPENDA
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut yang diadakan	240 stel	496,500,000	80 stel	171,042,700	80 stel	104,724,700	0		BAPENDA
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data dan laporan Pengelolaan Administrasi Pegawai	3 Dok	17,710,000	1 Dok	-	1 Dok	4,393,000	0		BAPENDA
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan SKP pegawai	6 Dok	14,994,000	2 Dok	-	2 Dok	4,918,000	0		BAPENDA

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	18 Orang	438,063,000	6 Orang	-	6 Orang	51,663,000	0		BAPENDA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BinteK	30 Orang	966,475,000	10 Orang	84,864,330	10 Orang	67,680,000	0 org		BAPENDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,125,403,200		1,083,935,694		1,152,949,450		57,123,232	BAPENDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45 Jenis	64,095,000	15 Jenis	55,124,000	15 Jenis	20,911,200	0	-	BAPENDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	16 8 Jenis	488,025,600	56 Jenis	185,642,656	56 Jenis	156,647,750	0	-	BAPENDA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Jenis	60,450,000	10 Jenis	25,628,600	10 Jenis	16,854,000	0	-	BAPENDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor yang disediakan	15 Jenis	457,327,500	5 Jenis	94,205,800	5 Jenis	157,289,000	1	4,140,000	BAPENDA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 Jenis	457,483,100	20 Jenis	65,259,200	20 Jenis	269,164,500	1	2,200,000	BAPENDA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan	9 Media	23,022,000	3 Media	6,240,000	3 Media	7,680,000	0	-	BAPENDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar / Dalam Daerah	23 Laporan 0	1,575,000,000	75 Laporan	651,835,438	75 Laporan	524,403,000	20 Laporan	50,783,232	BAPENDA
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,130,375,633		1,329,646,650		1,203,584,917	0	-	BAPENDA
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang disediakan	20 Jenis	234,041,500	5 Jenis	93,412,050	10 Jenis	21,644,000	0	-	BAPENDA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	18 Jenis	1,716,334,133	10 Jenis	686,449,800	4 Jenis	614,296,000	0	-	BAPENDA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	2 Unit	120,000,000	0 Unit	268,849,500	1 Unit	-	0	-	BAPENDA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	60,000,000	1 Unit	280,935,300	0 Unit	-	0	-	BAPENDA
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		567,644,917			BAPENDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		3,707,666,368		885,411,996		1,077,532,421	0	137,774,822	BAPENDA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat, materai dan jasa pengiriman	3 Dok	44,330,000	1 Dok	22,000,000	1 Dok	14,530,000	1	3,300,000	BAPENDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Listrik, Telepon, PDAM, Koneksi Internet dan Jasa Sambungan TV Kabel	9 Laporan	680,215,618	3 Laporan	104,367,334	3 Laporan	165,274,729	2	17,144,642	BAPENDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	3 Laporan	2,983,120,750	1 Laporan	759,044,662	11 Laporan	897,727,692	1 Laporan	117,330,180	BAPENDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik		11,199,337,450		2,627,811,361		2,926,419,700		6,275,000	BAPENDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51 Unit	592,347,500	17 Unit	207,450,150	17 Unit	216,650,000	0	5,400,000	BAPENDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	15 jenis	159,588,000	5 jenis	46,556,720	5 jenis	39,450,000	0	875,000	BAPENDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	296,531,250	1 Unit	137,330,500	1 Unit	33,750,000	0	-	BAPENDA

		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan		10,150,870,700		2,236,473,991		2,636,569,700		278,253,766	BAPENDA
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			10,150,870,700		2,236,473,991		2,636,569,700		278,253,766	BAPENDA
		Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dok	1,046,573,500	1 Dok	212,156,505	1 Dok	247,727,500	1 Dok	30,527,006	BAPENDA
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dok	759,880,000	6 Dok	149,205,952	1 Dok	204,041,500	6 Dok	10,101,700	BAPENDA
		Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	630,466,000	1 Laporan	187,634,600	1 Laporan	170,785,000	1 Laporan	12,609,000	BAPENDA
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit	766,544,500	6 Unit	449,987,438	4 Unit	237,681,500	0 Unit		BAPENDA
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	1,048,842,100	1 Laporan	182,929,388	1 Laporan	154,689,500	1 Laporan	20,325,200	BAPENDA
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	542,320,000	1 Laporan	74,382,345	1 Laporan	149,202,000	0.5 Laporan	31,246,500	BAPENDA
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6 Laporan	414,574,000	2 Laporan	61,401,300	2 Laporan	103,217,000	2 Laporan (obyek Pajak)	10,922,400	BAPENDA
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dok	712,540,000	3 Dok	189,682,413	3 Dok	207,950,000	3 Dok	128,100,660	BAPENDA
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Dok	667,100,500	1 Dok	189,033,869	1 Dok	218,878,000	0.5 Dok (Layanan)	21,383,000	BAPENDA
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	27 Dok	661,709,000	9 Dok	73,340,625	9 Dok	150,867,000	3 Dok	5,724,400	BAPENDA
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	975 Dok	726,776,000	350 Dok	152,211,177	325 Dok	220,947,000	100 Dok	3,450,800	BAPENDA
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150 Dok	702,441,100	50 Dok	78,814,573	50 Dok	130,023,700	0 Dok		BAPENDA
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak	24 Dok	550,804,000	5 Dok	105,146,612	7 Dok	171,424,000	0 Dok		BAPENDA
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Dok	835,300,000	12 Dok	117,209,266	12 Dok	225,100,000	2 laporan (Dok)	3,863,100	BAPENDA
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Dok	85,000,000	1 Dok	13,337,928	1 Dok	44,036,000	0 Dok		BAPENDA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										3.3	1,471,378,153	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan indikator sasaran.

Penilaian Kinerja pada BAPENDA Kabupaten Seruyan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. fokus dengan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2

Pengukuran Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	target indikator kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian
1	2	5	4	6		
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang transparan dan Akuntabel		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	6,58	5,54	84,19%
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	40	0,05	12,50%
		Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	IKM terhadap pelayanan pajak daerah	80	80,00	100 %

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Rasio PAD)

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 sampai dengan 2024 terlihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Daerah (PD) (Rp)	Kontribusi PAD terhadap PD (%)
1	2	3	4
2021	83.036.151.308,92	1.113.153.187.993,89	7,46
2022	82.393.420.980,79	1.112.202.360.519,55	7,41
2023	71.958.279.810,29	1.195.613.198.853,29	6,02
2024	75.426.432.626,20	1.360.282.269.422,20	5,54

Rasio tersebut menjelaskan tentang derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD), semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintahan.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2021-2024 sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Tahun 2024

Tahun	Realisasi PAD (RP)	Pertumbuhan per Tahun (%)
1	2	3
2021	83.036.151.308,92	18,02
2022	82.433.031.703,79	- 0,73
2023	71.958.279.810,29	-12,71
2024	75.426.432.626,20	4,82

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Peertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 cukup menggembiran sebesar 4,82 % karena jika dibandingkan dengan pertumbuhan PAD tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar -12,71 %

Dengan Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan tahun 2024 yang hanya sebesar 4,82 % diklasifikasikan **Belum Mandiri**. Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan belum mampu untuk membiayai secara mandiri pembangunan daerah dan seyogyanya bahwa sebagian besar belanja pemerintah daerah Kabupaten Seruyan masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2. 5
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	PENDAPATAN DAERAH	1.112.527.113.051,56	1.113.153.187.993,89	100,06
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.099.896.961,56	83.036.151.308,92	62,39
	PENDAPATAN TRANSFER	954.853.689.590,00	1.004.973.554.262,97	105,25
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.573.526.500,00	25.143.482.422,00	102,32
2022	PENDAPATAN DAERAH	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	95,52
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.575.856.854,00	82.433.031.703,79	65,64
	PENDAPATAN TRANSFER	1.028.571.649.304,00	1.019.316.823.163,76	99,10
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.276.841.735,00	10.492.116.375,00	102,09
2023	PENDAPATAN DAERAH	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,77
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36
	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
2024	PENDAPATAN DAERAH	1.441.916.718.482,40	1.360.282.269.422,20	94,34
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.612.984.053,00	75.426.432.626,20	53,26
	PENDAPATAN TRANSFER	1.300.303.734.429,40	1.284.855.836.796,00	98,81
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00

IKM terhadap pelayanan pajak daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda Kabupaten Seruyan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6
Nilai IKM BAPENDA Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah				
Nilai IKM (point)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	80	80	84,38	85,00

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan kuisioner terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan Pajak Daerah.

Dalam penghitungan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui survey kepada pemohon penerima pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, responden yang ditemui adalah wajib pajak yang secara langsung merasakan pelayanan. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak daerah realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 85,00 dari target 80 atau tingkat capaian Kinerja sebesar 106,25%. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 84,38 realisasi kinerja mengalami peningkatan.

Berdasarkan Kategorisasi Mutu Pelayanan maka mutu pelayanan Pajak daerah dan Restribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Kinerja B (BAIK).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Realisasi PAD belum optimal, mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Restribusi Daerah;
2. Adanya tunggakan pajak daerah;
3. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
5. Memperluas kerja sama dengan perbankan guna memberikan kemudahan akses pembayaran pajak;
6. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan;
9. Meningkatkan inovasi dalam sistem digitalisasi pajak daerah dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile;
10. Peningkatan koordinasi antara unit/badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
11. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
12. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KABUPATEN SERUYAN

3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan rencana yang memuat Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan serta dana indikatif yang dibutuhkan guna mencapai sasaran. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub-kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas fungsi. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen atas kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif sebagaimana pada perubahan RKPD Kabupaten Seruyan tahun 2025 maka Perubahan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja serta pagu dana indikatif yang dibutuhkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada Tabel 3.1 dan Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dan Program Nomenklatur pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SERUYAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							16.163.211.000,00	14.982.029.853,00	12.555.262.936,00	-3.607.948.064,00							16.243.474.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							16.163.211.000,00	14.982.029.853,00	12.555.262.936,00	-3.607.948.064,00							16.243.474.000,00	
	5.02	KEUANGAN							16.163.211.000,00	14.982.029.853,00	12.555.262.936,00	-3.607.948.064,00							16.243.474.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	12.511.254.400,00	12.345.460.153,00	10.766.094.236,00	70.262.700,00							12.581.517.100,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	69.415.000,00	53.063.000,00	53.063.000,00	-16.352.000,00		-	-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab. Seruyan		69.415.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	20.468.000,00	4.616.000,00	4.616.000,00	-15.852.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.468.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.814.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.814.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.814.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.814.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.175.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.105.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.989.000,00	7.989.000,00	7.989.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.989.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu				100 %	100 %	19.978.000,00	19.925.500,00	19.925.500,00	-52.500,00			-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan	19.978.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.980.000,00	4.927.500,00	4.927.500,00	-52.500,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.998.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	678.429.000,00	233.378.700,00	178.178.700,00	-500.250.300,00			-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan	678.429.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	188.000.000,00	104.724.700,00	104.724.700,00	-83.275.300,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6.370.000,00	4.393.000,00	4.393.000,00	-1.977.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.370.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	4.998.000,00	4.918.000,00	4.918.000,00	-80.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.998.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	146.021.000,00	51.663.000,00	31.643.000,00	-114.378.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		146.021.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	333.040.000,00	67.680.000,00	32.500.000,00	-300.540.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		333.040.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.041.287.100,00	1.152.949.450,00	874.138.850,00	-167.148.250,00			-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan	1.061.287.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	333.040.000,00	67.680.000,00	32.500.000,00	-300.540.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	+	+			333.040.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.041.287.100,00	1.152.949.450,00	874.138.850,00	-167.148.250,00			+	+		Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan	1.061.287.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	21.365.000,00	20.911.200,00	20.911.200,00	-453.800,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	+	+			21.365.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	56 Paket	158.524.800,00	156.647.750,00	157.474.150,00	-1.050.650,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	+	+			178.524.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.475.000,00	16.854.000,00	16.854.000,00	-3.621.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	+	+			20.475.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	154.901.250,00	157.289.000,00	132.689.000,00	-22.212.250,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	+	+			154.901.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	153.341.050,00	269.164.500,00	269.164.500,00	115.823.450,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	+	+			153.341.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	+	+			7.680.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	525.000.000,00	524.403.000,00	269.366.000,00	-255.634.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			525.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Terhadap Pengadaan RKBMD				100 %	100 %	1.125.818.164,00	1.203.584.917,40	194.740.800,00	-931.077.364,00			-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan		1.125.818.164,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	88.575.100,00	21.644.000,00	21.644.000,00	-66.931.100,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			88.575.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	619.243.064,00	614.296.000,00	173.096.800,00	-446.146.264,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			619.243.064,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	358.000.000,00	567.644.917,40	0,00	-358.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			358.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terepenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.190.701.596,00	1.077.532.420,65	1.040.962.420,65	-149.739.175,35			-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan		1.190.701.596,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.015.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	-485.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.015.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	165.274.729,00	165.274.728,65	176.824.728,65	11.549.999,65	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.274.729,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.010.411.867,00	897.727.692,00	849.607.692,00	-160.804.175,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.010.411.867,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terepenuhinya Pemeliharaan BMD Sesuai Dengan RKPBMD Perangkat Daerah				100 %	100 %	313.660.250,00	289.650.000,00	300.670.000,00	-12.990.250,00			-	-	Badan Pendapatan Daerah Kab.Seruyan		313.660.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	198.832.500,00	216.650.000,00	216.650.000,00	17.817.500,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			198.832.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	54.054.000,00	39.450.000,00	43.720.000,00	-10.334.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.054.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.773.750,00	33.750.000,00	40.300.000,00	-20.473.750,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.773.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2. 5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah				100 %	100 %	3.651.956.600,00	2.636.569.700,00	1.789.168.700,00	10.000.300,00							3.651.956.600,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pengeluaran dan Restitusi Daerah, Jumlah Data Pendataan dan Laporan Pengelolaan Pajak dan Restitusi Daerah, Jumlah Dokumen Laporan Pajak Daerah dan Laporan Keterserahan atau Pajak Daerah dan Restitusi, Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 %	100 %	3.651.956.600,00	2.636.569.700,00	1.789.168.700,00	-1.862.787.900,00			-	-	Wajib Pajak dan Retribusi		3.651.956.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	365.524.400,00	247.727.500,00	144.690.000,00	-220.834.400,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			365.524.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	269.960.200,00	204.041.500,00	180.870.000,00	-89.090.200,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			269.960.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	226.821.900,00	170.785.000,00	119.235.500,00	-107.586.400,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			226.822.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	4 Unit	277.181.500,00	237.681.500,00	116.369.500,00	-160.812.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		277.181.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	366.280.500,00	154.689.500,00	68.574.000,00	-297.706.500,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		366.280.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	197.440.000,00	149.202.000,00	125.941.000,00	-71.499.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		197.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	154.858.000,00	103.217.000,00	49.118.000,00	-105.740.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154.858.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	254.180.000,00	207.950.000,00	173.920.000,00	-80.260.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		254.180.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	239.033.400,00	218.878.000,00	159.488.000,00	-79.545.400,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		249.033.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				9 Dokumen	9 Dokumen	243.903.000,00	150.867.000,00	119.006.000,00	-124.897.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		243.903.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				325 Dokumen	325 Dokumen	265.592.000,00	220.947.000,00	145.129.000,00	-120.463.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		265.592.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	255.813.700,00	130.023.700,00	58.627.700,00	-197.186.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		255.813.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	205.268.000,00	171.424.000,00	123.305.500,00	-81.962.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		205.268.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	300.100.000,00	225.100.000,00	145.055.500,00	-155.044.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	44.036.000,00	59.839.000,00	29.839.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	J U M L A H							16.163.211.000,00	14.982.029.853,00	12.555.262.936,00	-3.607.948.064,00						16.243.474.000,00		

3.2 Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur

Tema pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah “**Fondasi Transformasi Pembangunan**”. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan serta Janji politik Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Sebagaimana dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Seruyan difokuskan pada **Perencanaan Integrasi Sistem Informasi dan Teknologi**.

Berkaitan dengan Janji politik Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah integrasi dengan program nomenklatur, dapat ditetapkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sesuai dengan focus pembangunan prioritas daerah setiap tahunnya. Integrasi program prioritas janji politik Bupati dengan program nomenklatur Tahun 2025 pada Bapenda Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur Tahun 2025

No	Program Prioritas Janji Politik Bupati	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2025	
							Volume	Pagu
1	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengembangan Aplikasi	Kuala Pembuang	OB	52.000.000
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Koordinasi		Kegiatan	31.839.000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana kerja (P-RENJA) BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu kepada sasaran dan prioritas serta program pembangunan daerah, sebagaimana tertuang pada Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, diharapkan kepada seluruh pegawai lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan bersama-sama dan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan Perubahan Renja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dan tetap menjaga Konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perubahan Renja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini menjadi acuan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Tahun 2025 serta penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Tahun 2025. Dalam Perubahan Rencana Kerja ini merupakan hal yang mungkin bersifat asumptif dan prediktif, yang besarnya kemungkinan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pedoman Program Prioritas yang telah ditetapkan bersama, dan dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja ini.

Semoga dengan adanya Rencana Kerja ini misi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sebagai koordinator dibidang penerimaan daerah berjalan dengan baik dan sukses.

Kuala Pembuang, 12 Agustus 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah



SUKARDI, S.E

Pembina Tk. I/IV/b

NIP. 19710603 200501 1 012